



TERTATA: Penghuni beraktivitas di rumah deret program perumahan dan permukiman layak huni (Mahananni), Terban, Gondokusuman, Kota Jogja, kemarin (16/1). Luas kawasan kumuh di Kota Jogja masih menyisakan sekitar 57,14 hektare dan harus diselesaikan hingga 2031.



MENUJU

- Kawasan kumuh di Kota Jogja harus selesai pada 2031.
- Sesuai SK Wali Kota Jogja Nomor 158 Tahun 2021 tentang Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, kawasan kumuh yang sebesar **80,94 hektare**
- Harus diselesaikan dalam waktu **10 tahun**.

GRAFIS: HERPPI KARTUN/RADAR JOGJA



GUNTUR ADA TITIKAN/RADAR JOGJA

Setahun Kurangi 23,80 Ha Kawasan Kumuh

Di Kota Jogja Tinggal Tersisa 57,14 Hektare

JOGJA - Luas kawasan kumuh di Kota Jogja berhasil berkurang pada 2024. Namun untuk tahun ini Pemkot Jogja masih menyisakan sekitar 57,14 hektare luas kawasan kumuh yang harus diselesaikan hingga 2031 mendatang.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja Umi Akhsanti mengatakan, pada 2023 pihaknya mampu mengurangi 23,80 hektare kawasan kumuh. Dari total luas kawasan kumuh di Kota Jogja yang ditetapkan pada 2023 sebesar 80,94 hektare.

"Sehingga untuk tahun ini, kawasan kumuh di Kota Jogja masih menyisakan sekitar 57,14 hektare," ujar Umi saat dikonfirmasi kemarin (16/1).

Dapat berkurangnya kawasan kumuh juga berkat adanya berbagai upaya penataan. Salah satunya melalui konsep perumahan dan permukiman layak huni (Mahananni) di wilayah Terban dengan luas yang ditata 2 hektare. Serta Pringgokusuman dengan sasaran beberapa blok rumah.

Selain di wilayah itu, pihaknya juga melakukan penataan tujuh parameter lain. Meliputi revitalisasi bangunan, pembangunan jalan, saluran air minum, drainase, pengelolaan limbah, pengelolaan sampah, serta pemba-

ngunan proteksi kebakaran pada beberapa wilayah di Kota Jogja.

Dia menjelaskan, kawasan kumuh di Kota Jogja harus selesai pada 2031. Sebab, sesuai SK Wali Kota Jogja Nomor 158 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, kawasan kumuh yang sebesar 80,94 hektare itu harus diselesaikan selama kurun waktu 10 tahun.

"Untuk penanganan jalan lingkungan, kami berkolaborasi dengan pembangunan jalan paving di kelurahan," terang Umi.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Jogja Sugeng Purwanto menyampaikannya, dengan adanya penataan

kawasan kumuh dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat. Sekaligus meningkatkan estetika wilayah kota karena kawasan kumuh yang berkurang.

Dia pun menilai, untuk hasil penataan kawasan kumuh di Terban juga luar biasa. Sebab dari konstruksi, bangunan dan peran serta aktif dari masyarakat yang menempati rumah terbilang sudah sangat bagus. Tidak hanya tertata, namun juga memberikan kenyamanan aspek lingkungan dan keamanan.

"Bangunannya bagus. Tidak sekedar menjadi baik tertata. Tapi punya kekuatan konstruksi yang sangat bisa diandalkan," ungkap Sugeng. (Inu/laz/hep)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005